

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah serangkaian langkah berkelanjutan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan masyarakat secara berkesinambungan.² Proses ini mencakup berbagai dimensi, mulai dari peningkatan infrastruktur fisik, pengembangan sumber daya manusia, hingga penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Tujuan utama pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan antar wilayah, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.³

Pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat. Pembangunan ekonomi, yang berfokus pada peningkatan kapasitas produksi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, merupakan pilar utama dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional.⁴

Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap

² Agoes Komaroellah, *Ekonomi Pembangunan (Teori dan Aplikasi)*, (ed. Sri Rizqi Wahyuningrum), (Pamekasan: UIN Madura Press, 2024), hlm. 50.

³ Sudjana, "Hakikat Adil dan Makmur sebagai Landasan Hidup dalam Mewujudkan Ketahanan untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ketahanan Nasional* 24, no. 2 (Agustus 2018): 135-151, diakses 1 Januari 2025, <http://dx.doi.org/10.22146/jkn.33573>.

⁴ A. S. Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi, Sustainable Transport, Sustainable Development*, (Bandung: Unpad Press, 2018), hlm. 223.

pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan menjadi landasan penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.⁵ Tenaga kerja adalah elemen esensial dalam sistem ekonomi yang merujuk pada individu yang memiliki kapasitas fisik dan intelektual untuk melakukan kegiatan produktif, menghasilkan output bernilai ekonomis yang berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶ Pemahaman tersebut mengindikasikan bahwa tenaga kerja merupakan aktivitas sosial yang saling terkait, di mana hasil yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga memiliki implikasi yang luas bagi masyarakat.

Sebagai faktor produksi yang fundamental, tenaga kerja memegang peranan sentral dalam dinamika perekonomian.⁷ Penyerapan tenaga kerja merupakan indikator krusial keberhasilan suatu negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Proses ini menuntut penciptaan peluang kerja yang tidak hanya memadai secara kuantitas, namun juga relevan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja yang ada.⁸ Oleh

⁵ Ahmad Rizal et al., *Perspektif Peran Ketenagakerjaan dalam Pembangunan*, (Bandung: Unpad Prress, 2018), hlm. 13.

⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

⁷ Khairinal dan Muazza, *Ilmu Ekonomi dalam PLP*, (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019), hlm. 5.

⁸ G. K. Jagaditha dan I Gusti Wayan Murjana Yasa, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali”, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud* 10, no. 12 (17 Januari 2022): 4563-4590, diakses 15 November 2024, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/73224/42864>.

karena itu, perencanaan tenaga kerja yang efektif menjadi sangat penting. Penyerapan tenaga kerja yang optimal tidak hanya akan mengurangi tingkat pengangguran, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya mencapai pemerataan pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan keberagaman sumber daya alam dan manusianya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai 281,6 juta jiwa, dengan 215,37 juta jiwa di antaranya berusia 15 tahun ke atas.⁹ Partisipasi penduduk dalam pembangunan yang tercermin dalam perannya sebagai tenaga kerja yang berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi. Pemerintah terus mendorong perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.¹⁰ Namun, permasalahan pengangguran masih menjadi tantangan utama dalam perekonomian Indonesia.¹¹ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,63%, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 144,64 juta jiwa, sementara tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi, yakni 4,91% atau sekitar 7,47 juta jiwa yang belum memperoleh pekerjaan.¹²

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia tidak lepas dari permasalahan yang sama. Jumlah angkatan

⁹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2025*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025), hlm. 133-142.

¹⁰ Imelda Hutasoit, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 163.

¹¹ Andi Ika Fahrika dan Zulkifli, ed. Dahlia dan Juhasdi, *Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*, (Makassar: Yayasan Barcode, 2020), hlm. 34.

¹² Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), hlm. 3.

kerja yang setiap tahunnya bertambah menjadi tantangan tersendiri bagi pemangku kebijakan agar memaksimalkan sumber daya manusia yang ada. Perluasan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang akan masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran.

Selama periode 2019 hingga 2024, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur menunjukkan tren yang cukup dinamis. Jumlah angkatan kerja yang mengalami peningkatan konsisten setiap tahun hingga mencapai 24,4 juta jiwa pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja. TPAK juga mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2024 tercatat mencapai 73,45% yang mengindikasikan proporsi penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja, tergolong tinggi. Hal ini mencerminkan dinamika ketenagakerjaan di Jawa Timur yang terus berkembang, seiring dengan pertumbuhan populasi serta perubahan kondisi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

Jumlah penduduk yang bekerja juga mengalami peningkatan, dari sekitar 21,03 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi 23,36 juta jiwa pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat dampak krisis ekonomi. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan kesempatan kerja di Jawa Timur yang semakin membaik seiring dengan perkembangan ekonomi daerah. Sementara itu, angka pengangguran sempat

melonjak pada tahun 2020 namun kembali menurun secara bertahap di tahun-tahun berikutnya. TPT mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan angka 5,84%, lalu menurun kembali di tahun-tahun berikutnya, dan pada tahun 2024 menjadi 4,19%. Penurunan angka pengangguran ini menunjukkan adanya pemulihan sektor ketenagakerjaan yang didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru di Jawa Timur.¹³

Berdasarkan data pengangguran menurut kelompok umur, terdapat 285,4 ribu pengangguran berusia muda (20-24 tahun) pada tahun 2019. Angka ini meningkat menjadi 329,7 ribu pada tahun 2020, turun menjadi 295,1 ribu pada tahun 2021, lalu naik kembali menjadi 313,3 ribu pada tahun 2022, mencapai 384,9 ribu pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 turun menjadi 314,1 ribu. Lebih lanjut apabila ditinjau dari segi tingkat pendidikan menunjukkan bahwa TPT didominasi oleh lulusan SMA dan SMK. Dengan kata lain, permasalahan titik temu antara penawaran tenaga kerja lulusan SMA/SMK di Jawa Timur dengan tenaga kerja yang diminta di pasar kerja masih terjadi. Pengangguran seringkali muncul akibat adanya lapangan kerja yang sangat terbatas, sementara pencari kerja jumlahnya semakin bertambah dari tahun ke tahun.¹⁴

Tiga sektor utama yang mendominasi penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur selama 2019-2024 adalah sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Sektor pertanian tetap menjadi sektor utama

¹³ Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, *Laporan Perekonomian Indonesia 2024*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), hlm. 159.

¹⁴ Rizal et al., *Perspektif Peran Ketenagakerjaan*, hlm. 60.

dalam penyerapan tenaga kerja, dengan jumlah pekerja yang terus meningkat dari 6,44 juta pada 2019 menjadi 7,35 juta pada 2024. Sektor perdagangan besar dan eceran juga tumbuh dari 3,72 juta pada 2019 menjadi 4,35 juta pada 2024, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2020. Sementara itu, sektor industri pengolahan mengalami penurunan pada 2020, namun kembali meningkat hingga mencapai 3,54 juta tenaga kerja pada 2024, mengindikasikan pemulihan sektor industri di Jawa Timur.

Dominasi tiga sektor ini mencerminkan peran strategisnya dalam struktur perekonomian Jawa Timur, di mana sektor pertanian tetap menjadi penyerap tenaga kerja utama, sementara sektor perdagangan besar dan eceran mencerminkan dinamika konsumsi dan distribusi barang. Pemulihan sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan aktivitas manufaktur yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Tingginya penyerapan tenaga kerja dalam ketiga sektor ini mengindikasikan bahwa perekonomian Jawa Timur masih bergantung pada sektor primer dan sekunder, yang berperan penting dalam menyediakan lapangan kerja dan mendukung stabilitas ekonomi regional.¹⁵

Pasar tenaga kerja negara berkembang memiliki dua karakteristik. Pasar terbagi antara sektor formal dan informal.¹⁶ Terdapat peningkatan proporsi pekerja formal pada tahun 2024 yakni di angka 9 juta orang (38,51%) lebih

¹⁵ M. A. S. Izza et al, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022”, *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 3 (2 Juni 2023): 42–50, diakses 31 Januari 2025, <https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1122>.

¹⁶ Tri Wahyu Utami et al., *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (ed. Ali Hardana), (Makassar: CV. Ayrada Mandiri, 2021), hlm. 24.

tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, namun dominasi sektor informal masih menjadi karakteristik utama pasar tenaga kerja di Jawa Timur dengan menyerap 14,36 juta orang (61,49%). Hal ini mengindikasikan kesenjangan akan kebutuhan akan tenaga kerja terampil dengan ketersediaan lapangan kerja formal yang layak. Jika suatu daerah tidak mampu menciptakan lapangan kerja, maka kesenjangan ekonomi dapat semakin besar.¹⁷

Analisis data ketenagakerjaan di Jawa Timur pada tahun 2019-2024 mengindikasikan adanya sejumlah tantangan struktural yang mendasari permasalahan penyerapan tenaga kerja. Ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja menjadi isu sentral. Hal ini tercermin dari ketimpangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang pesat dengan ketersediaan lapangan kerja yang belum optimal.¹⁸ Selanjutnya, struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor informal. Sektor informal, meskipun menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, umumnya menawarkan upah yang rendah dan tidak memberikan jaminan sosial yang memadai. Kesenjangan antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan industri menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya keterampilan teknis, *soft skills*, dan pengalaman kerja yang relevan menyebabkan *mismatch* antara pencari kerja dan lowongan yang tersedia.¹⁹

¹⁷ Yeni Fitriani dan Aisyah Nurjanah, *Ekonomi untuk SMA Kelas XI*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, 2022), hlm. 70.

¹⁸ Gatiningsih dan Eko Sutrisno, *Modul Mata Kuliah Kependudukan dan Ketenagakerjaan*, (Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2017), hlm 148.

¹⁹ Kemendikbud, *Daya Saing SMK dalam Bursa Tenaga Kerja 4.0*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud, 2019), hlm. 153.

Salah satu faktor yang dapat berperan dalam penyerapan tenaga kerja adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Mankiw menjelaskan dalam hukum Okun (Okun's Law) bahwa ketika GDP riil meningkat sebesar 2% pada tahun tertentu, tingkat pengangguran akan mengalami penurunan sebesar 1%. PDRB, yang pada akhirnya mempengaruhi GDP, berpotensi menciptakan peluang kerja baru melalui peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Pertumbuhan PDRB mencerminkan ekspansi sektor usaha, peningkatan investasi, serta kenaikan daya beli masyarakat yang turut mendorong permintaan tenaga kerja.²⁰ Peningkatan output dan produktivitas ekonomi akan memperbesar kebutuhan tenaga kerja di berbagai industri untuk memenuhi permintaan pasar. Pertumbuhan PDRB diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran melalui mekanisme penyerapan tenaga kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Hidayati dkk., dalam teori modal manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur kualitas sumber daya manusia juga memiliki hubungan dengan penyerapan tenaga kerja. Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan sangat dibutuhkan perusahaan. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan industri pastinya akan mendorong inovasi dan perkembangan sektor ekonomi.²¹ Peningkatan IPM menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga

²⁰ N. Gregory Mankiw, *Macroeconomics 7th edition*, (New York: Worth Publisher, 2009), hlm. 261-262.

²¹ Hidayati et al., *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), hlm. 29.

kerja, yang membuat tenaga kerja lebih siap memenuhi kebutuhan pasar kerja. Wilayah dengan IPM yang tinggi cenderung memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih baik karena tenaga kerja yang tersedia lebih kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Faktor berikutnya yang berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja yakni tingkat pengangguran terbuka (TPT). Priyono dan Ismail mengemukakan, dalam teori Philips semakin rendah tingkat pengangguran, pasar tenaga kerja akan semakin ketat, sehingga permintaan tenaga kerja akan meningkat dan perusahaan akan bersaing untuk menarik tenaga kerja. Sebaliknya, pada tingkat pengangguran yang lebih tinggi tekanan perusahaan untuk bersaing mendapatkan tenaga kerja berkurang yang dampak pada peningkatan persaingan individu untuk mendapatkan pekerjaan.²² Hubungan TPT terhadap penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi TPT, semakin sedikit kesempatan bagi individu untuk masuk ke pasar kerja, karena perusahaan akan lebih selektif dalam merekrut tenaga kerja. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang rendah seringkali diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Upah minimum kabupaten/kota (UMK) juga termasuk dalam faktor yang berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Menurut Sumarsono, tingkat upah akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Tingkat upah yang naik akan mengakibatkan peningkatan biaya produksi perusahaan, selanjutnya akan

²² Priyono dan Zainuddin Ismail, *Teori Ekonomi*, (Surabaya: Dharma Ilmu, 2012), hlm. 439.

meningkatkan pula harga per unit produksi. Dalam jangka pendek kenaikan upah diantisipasi perusahaan dengan mengurangi produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan bekurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan.²³ Ketika terjadi kenaikan UMK terlalu tinggi, perusahaan dengan kemampuan finansial terbatas mungkin tidak mampu menyesuaikan diri, sehingga memilih untuk mengurangi jumlah tenaga kerja atau bahkan menghentikan operasinya. Oleh karena itu, penetapan upah minimum perlu mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan produktivitas serta penyerapan tenaga kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Adelia Silvia dan Dwi Susilowati terkait faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa menunjukkan bahwa secara parsial variabel PDRB dan UMK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.²⁴ Temuan serupa juga dihasilkan oleh Emil Abdhal Hafiz dan Ria Haryatiningsih, yang menyimpulkan bahwa PDRB dan UMK memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.²⁵ Hasil ini diperkuat oleh penelitian Rudi Hartono dkk., yang mengidentifikasi bahwa variabel PDRB dan UMK berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.²⁶ Penelitian lain

²³ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm. 32.

²⁴ Adelia Silvia dan Dwi Susilowati, “Faktor-Faktor Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa”, *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE* 7, no. 04 (30 November 2023): 531–539, diakses 3 Januari 2025, <https://doi.org/10.22219/jie.v7i04.28107>.

²⁵ Emil Abdhal Hafiz dan Ria Haryatiningsih, “Pengaruh PDRB, UMK, IPM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Jawa Barat 2010-2020”, *JRIEB: Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 1 (21 Oktober 2021): 55-65, diakses 3 Januari 2025, <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.174>.

²⁶ Rudi Hartono et al., “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja”, *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan,*

yang dilakukan oleh Natalia Wedina Tobing dan Nurul Hanifa mengungkapkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja.²⁷ Selain itu, studi yang dilakukan oleh Fradya Randa dan Lastri Anggi Fani menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.²⁸ Berdasarkan tinjauan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum variabel PDRB, IPM, TPT, dan UMK menunjukkan pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, meskipun dengan tingkat pengaruh yang bervariasi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh PDRB, IPM, TPT, dan UMK terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun sebagian besar masih berfokus pada tingkat nasional atau provinsi secara keseluruhan, sehingga belum menggambarkan variasi dan dinamika antar kabupaten/kota secara spesifik. Pemilihan keempat variabel tersebut didasarkan pada perannya yang strategis. PDRB menggambarkan kapasitas ekonomi daerah, IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia, TPT menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja, dan UMK merepresentasikan kebijakan upah yang dapat memengaruhi keputusan perekrutan tenaga kerja. Provinsi Jawa Timur dipilih

dan Manajemen 14, no. 1 (25 Mei 2018): 36-43, diakses 3 Januari 2025, <https://doi.org/10.30872/jinv.v14i1.3545>.

²⁷ Natalia Wedina Tobing dan Nurul Hanifa, “Pengaruh Jumlah Penduduk, UMK dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah”, *Independent: Journal of Economics* 4, no. 1 (21 Juli 2024): 85–94, diakses 3 Januari 2025, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent/article/view/60215>.

²⁸ Fradya Randa dan Lastri Anggi Fani, “Pengaruh Infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penyerapan Tenaga Kerja serta Implikasi Pertumbuhan Ekonomi”, *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 5, no. 4 (31 Desember 2023): 1405-1408, diakses 3 Januari 2025, <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i4.755>.

karena memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar serta keragaman struktur ekonomi di tingkat kabupaten/kota. Keberagaman inilah yang memungkinkan analisis dilakukan secara lebih detail dengan tetap mempertahankan kondisi dari setiap wilayah. Sementara itu, periode tahun 2019-2024 dipilih karena rentang waktu tersebut mencerminkan dinamika ekonomi terkini dan mencukupi untuk mengamati pola hubungan antar variabel dari waktu ke waktu.

Pemilihan Provinsi Jawa Timur dalam penelitian ini didasarkan pada posisinya sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia serta sangat berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Jawa Timur juga memiliki keragaman struktur ekonomi antar kabupaten/kota yang mencerminkan dinamika ekonomi daerah secara lebih kompleks sehingga menjadi wilayah yang representatif untuk dianalisis. Selain itu, peneliti memilih fokus pada penyerapan tenaga kerja karena isu ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi yang sangat relevan dalam konteks ketimpangan kesempatan kerja, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Penyerapan tenaga kerja memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, serta produktivitas ekonomi daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya serta didorong oleh ketertarikan peneliti terhadap isu ketenagakerjaan di tingkat daerah, khususnya dalam melihat bagaimana variabel-variabel ekonomi dan sosial berperan dalam proses penyerapan tenaga kerja, maka peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Keempat

variabel yang dipilih, yaitu PDRB, IPM, TPT, dan UMK dinilai memiliki relevansi yang kuat dalam memengaruhi dinamika tenaga kerja di suatu wilayah. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk meneliti pengaruh produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum kabupaten/kota terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah sesuai dengan penelitian yang tercantum dalam latar belakang penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data BPS Provinsi Jawa Timur menunjukkan, menurut kelompok umur, 285,4 ribu pengangguran adalah berusia muda (20-24 tahun) pada 2019, angka tersebut meningkat menjadi 384,9 ribu di tahun 2023, dan pada 2024 turun menjadi 314,1 ribu. Lebih lanjut apabila ditinjau dari segi tingkat pendidikan menunjukkan bahwa TPT didominasi oleh lulusan SMA dan SMK. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan penduduk usia produktif.
2. Meskipun terdapat peningkatan proporsi pekerja formal pada tahun 2024 yakni di angka 9 juta orang (38,51%) lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, dominasi sektor informal masih menjadi karakteristik utama pasar tenaga kerja di jawa timur dengan menyerap 14,33 juta orang (63,11%). Hal ini mengindikasikan kesenjangan akan kebutuhan akan tenaga kerja terampil dengan ketersediaan lapangan kerja formal yang layak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat salah satu di antara variabel PDRB, IPM, TPT, dan UMK berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024?
2. Apakah variabel PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024?
3. Apakah variabel IPM berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024?
4. Apakah variabel TPT berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024?
5. Apakah variabel UMK berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

- a. Untuk menguji diantara variabel PDRB, IPM, TPT, dan UMK berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.
- b. Untuk menguji variabel PDRB berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.

- c. Untuk menguji variabel IPM berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.
- d. Untuk menguji variabel TPT berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.
- e. Untuk menguji variabel UMK berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan menunjukkan keterkaitan antara PDRB, IPM, TPT, dan UMK terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai variabel-variabel ekonomi dalam upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan sumbangsih pemikiran mengenai hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan terkait penyerapan kerja di Jawa Timur.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini dilaksanakan untuk menambah wawasan dan memperkaya perbendaharaan kepustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, dan keterangan tambahan yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dan juga dapat dijadikan sebagai referensi dan pembanding untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang sejenis.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini obyek penelitian difokuskan pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Ruang lingkup yang dibahas yaitu terdiri empat variabel bebas (X) yaitu PDRB, IPM, TPT, dan UMK, juga satu variabel terikat (Y) yaitu penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup periode tahun 2019 hingga 2024.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti hanya mengukur keterkaitan hubungan antara empat varibel independen yaitu PDRB, IPM, TPT, dan UMK yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur. Keterbatasan waktu penelitian, pemikiran dan tenaga sehingga

penelitian hanya menganalisis sumber data statistik dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2019 hingga 2024.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya, atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerjaan (lapangan pekerjaan) untuk diisi oleh para pencari kerja. Penyerapan ini berkaitan erat dengan interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar, yang secara bersamaan menentukan tingkat upah dan tingkat penggunaan tenaga kerja yang seimbang. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja merupakan indikator penting dalam menganalisis keseimbangan pasar tenaga kerja dan efisiensi alokasi sumber daya manusia.²⁹

b. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah. Hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut. Terdapat dua jenis PDRB, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku

²⁹ Ahmad Wahyudi, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Ghilia Indonesia, 2004), hlm. 10.

(nominal) dan PDRB atas dasar harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku mengindikasikan nilai sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah pada periode tertentu. Sebaliknya, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara agregat maupun per kategori dari tahun ke tahun, dengan mengeliminasi pengaruh inflasi.³⁰

c. Indeks Pembangunan Manusia

IPM adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai pencapaian pembangunan manusia di suatu negara. IPM mengukur akses penduduk terhadap hasil pembangunan di bidang-bidang krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, yang merepresentasikan kapabilitas dasar manusia. Konsep pembangunan manusia, yang pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui *Human Development Report* (HDR) pada tahun 1990, menekankan pada peningkatan kualitas hidup manusia. UNDP mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan tiga dimensi utama yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.³¹

³⁰ Maryam Jamilah An Hasibuan et al., “Pemodelan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah menggunakan Bootstrap Aggregating Multivariate Adaptive Regression Splines (Bagging Mars)”, *Jurnal Gaussian* 8, no. 1 (Februari 2019): 139-148, diakses 2 Januari 2025, <https://doi.org/10.14710/j.gauss.8.1.139-148>.

³¹ Bakhtiar Efendi et al., *Teori Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi*. (ed. Miftahul Jannah), (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2024), hlm 3-7.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT didefinisikan sebagai persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja, mencakup individu yang aktif mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau tidak mencari karena merasa putus asa (*discouraged workers*), serta mereka yang telah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka mengacu pada kondisi individu yang tidak bekerja sama sekali, sedang aktif mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu, atau sedang berupaya memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Fenomena pengangguran terbuka umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja yang tersedia dengan kapasitas lapangan kerja untuk menyerapnya. Oleh karena itu, TPT menjadi indikator penting untuk mengukur ketidakselarasan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di pasar kerja.³²

e. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah minimum merupakan standar upah terendah yang ditetapkan sebagai acuan bagi pengusaha dalam menentukan besaran upah pekerja/buruh di perusahaan. Terdapat dua jenis upah minimum, yaitu UMP yang berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi, dan UMK. UMK, yang ditetapkan oleh gubernur, berlaku spesifik di wilayah kabupaten/kota tertentu. Dengan demikian, upah minimum

³² Rhivna Cilviyani Rambe et al., “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi”, *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan* 8, no. 1 (31 Maret 2019): 54–67, diakses 4 Januari 2025, <https://doi.org/10.22437/jels.v8i1.11967>.

berfungsi sebagai jaring pengaman untuk mencegah praktik pembayaran upah di bawah standar yang layak.³³

2. Definisi Operasional

a. Penyerapan Tenaga Kerja

Data ketenagakerjaan di Indonesia dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui sensus dan survei. Salah satu survei periodik yang secara khusus dirancang untuk menyediakan data komprehensif mengenai kondisi ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Pengumpulan data Sakernas mengacu pada konsep dan definisi "*Labour Force Concept*" yang direkomendasikan oleh *International Labour Organization* (ILO), memastikan standar dan komparabilitas internasional.³⁴

b. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB atas dasar harga berlaku dapat diestimasi melalui dua pendekatan yaitu langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung menggunakan data yang bersumber langsung dari wilayah yang bersangkutan. Sebaliknya, pendekatan tidak langsung mengalokasikan angka pendapatan regional tingkat provinsi ke masing-masing kabupaten/kota berdasarkan alokator tertentu. Rumus untuk sektor yang tersedia nilai produksinya:³⁵

³³ Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 181.

³⁴ Diah Widarti, *Kajian tentang Indikator Kerja yang Layak di Indonesia*, (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2008), hlm. 19.

³⁵ Sub-Direktorat Konsolidasi Neraca Produksi Regional, *Pedoman Praktis Perhitungan PDRB Kabupaten/Kota*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2008), hlm. 38.

$$NTB_i = \frac{O_i}{\Sigma O_i} \times NTB$$

Keterangan:

NTB_i = Nilai tambah untuk kabupaten i.

O_i = Nilai produksi untuk kabupaten i.

ΣO_i = Jumlah nilai produksi untuk n kabupaten.

NTB = Nilai tambah bruto suatu sektor di provinsi.

c. Indeks Pembangunan Manusia

IPM dihitung dengan menggunakan formula khusus yang menggabungkan tiga komponen yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. IPM memberikan ukuran komposit yang menggabungkan kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pembangunan manusia di suatu negara. IPM dihitung dengan rumus berikut:³⁶

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka terdiri dari pencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka dapat diukur dengan menggunakan rumus berikut:³⁷

³⁶ Efendi, *Teori Indeks.....*, hlm. 8-9.

³⁷ Zainal Arifin et al., "Peramalan Pengangguran Menggunakan Metode Double Exponential Smoothing di Provinsi Kalimantan Timur", *Prosiding Seminar Nasional Ilmu*

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

e. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Formula perhitungan upah minimum adalah upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun berjalan. Upah minimum dapat dihitung dengan rumus:³⁸

$$UM_n = UM_t + (UM_t \times (Inflasi_t + \% \Delta PDB_t))$$

Keterangan:

UM_n = Upah minimum yang akan ditetapkan.

UM_t = Upah minimum tahun berjalan.

$Inflasi_t$ = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

ΔPDB_t = Pertumbuhan produk domestik bruto yang dihitung dari pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan.

Komputer dan Teknologi Informasi 4, No. 1 (Maret 2019): 24-29, diakses 4 Januari 2025, <https://ejournals.unmul.ac.id/index.php/SAKTI/article/view/1943>.

³⁸ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, Pasal 2-3.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian Awal

Bagian ini berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, gambar, lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Inti

a. Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

b. Bab II Landasan Teori

Berisi tentang teori yang berkaitan dengan variabel maupun sub variabel, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

c. Bab III Metode Penelitian

Berisi pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

d. Bab IV Hasil Penelitian

Berisi hasil penelitian yang memuat deskripsi data dan pengujian hipotesisnya serta hasil dari penelitian.

e. Bab V Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang pembahasan-pembahasan atas rumusan masalah mulai dari yang pertama sampai terakhir.

f. Bab VI Penutup

Berisi kesimpulan dan saran-saran

3. Bagian Akhir

Berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.